

## DERAP LARS PENOPANG PRODUKSI PG GONDANG BARU PASCA NASIONALISASI, 1957-1967

Putro Wasista Hadi, Nur Aini Setiawati

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

[putrowasista97@mail.ugm.ac.id](mailto:putrowasista97@mail.ugm.ac.id), [nur.aini.fib@ugm.ac.id](mailto:nur.aini.fib@ugm.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini membahas terjadinya militerisasi di perusahaan Pabrik Gula Gondang Baru, Klaten setelah dinasionalisasi pada 1957 dalam kurun satu dekade. Sebagai pokok persoalan akan dibahas berbagai langkah manajerial perusahaan setelah perusahaan dinasionalisasi terutama ketika bagian keamanan dikepalai seorang bekas anggota militer bernama Darmoatmodjo. Metode sejarah digunakan dalam penelitian ini agar dapat membantu dalam pencarian sumber, verifikasi, interpretasi data, dan penulisan. Hasilnya, dapat dimengerti bahwa militerisasi di PG Gondang Baru terjadi secara subtil merujuk pada kemampuan dasarnya sebagai penyedia jasa keamanan produksi. Konsekuensinya ialah kenaikan angka produktivitas PG Gondang Baru yang diukur dari luasan tanah konsesi, hasil produksi gula maupun persentase pencurian sepanjang satu dekade kepengurusan. Posisinya sebagai perusahaan negara membawa PG Gondang Baru sebagai lokus pertarungan politik baru pada 1960-an yang alih-alih membawa kedaulatan ekonomi bagi rakyat (petani) malah berujung pada subordinasi. Puncaknya terjadi setelah meletus peristiwa politik luar biasa G30S pada 1965 yang berujung pada penyingkiran gerakan kiri dan meroketnya angka produktivitas. Hal demikian berbanding lurus dengan peningkatan rembesan keuntungan yang diterima institusi militer daerah hasil dari keuntungan produksi PG Gondang Baru.

**Kata kunci:** Militerisasi, PG Gondang Baru, Nasionalisasi, Produksi Gula.

### Abstract

*This article examines the militarization of the Gondang Baru Sugar Factory in Klaten following its nationalization in 1957 over the course of a decade. It will analyze the various managerial steps of the company after its nationalization, with a particular focus on the role of the security department, which was headed by an ex-military member named Darmoatmodjo. This research uses a historical method to assist in sourcing, verification, data interpretation, and writing. Consequently, it can be concluded that the PG Gondang Baru militarization occurred in a subtle manner, in accordance with its fundamental role as a production security service provider. This resulted in an increase in PG Gondang Baru's productivity, as evidenced by the expansion of the concession land, sugar production, and the reduction in theft throughout the decade of management. The position of PG Gondang Baru as a state company placed it at the center of political conflict in the 1960s. Instead of fostering economic autonomy for the local farming community, the company's involvement in this political struggle led to a shift in power dynamics, with the elimination of leftist movements and a surge in productivity figures. This*

*was directly proportional to the increase in profit leakage received by regional military institutions as a result of PG Gondang Baru's production profits.*

**Keywords:** *Militarization, PG Gondang Baru, Nationalization, Sugar production.*

## **PENDAHULUAN**

Historisitas aksi nasionalisasi yang menysar pada perusahaan-perusahaan Belanda terhampar sesuai Proklamasi dikumandangkan pada Agustus 1945. Sepanjang dekade pertama pemerintah Indonesia telah mengambil alih berbagai perusahaan-perusahaan esensial, puncaknya pada 1953 secara resmi pemerintah memiliki hak penuh atas perusahaan ekonomi *De Javasche Bank* yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Indonesia. Tidak sedikit penelitian telah memberi uraian menyoal nasionalisasi. Khususnya pada tataran konsep terdapat suatu generalisasi yang merujuk pada John Sutter, bahwa nasionalisasi dimaknai sebagai bentuk paling radikal dari *Indonesianisasi*, tengaranya ialah adanya peningkatan peran dan/atau kuantitas rakyat Indonesia dalam struktur kepengurusan perusahaan milik Belanda. Akan tetapi, nasionalisasi perusahaan juga perlu dipahami sebagai tahapan menuju peralihan ekonomi nasional yang terdiri dari *Indonesianisasi*, Nasionalisasi, dan perubahan struktur (perusahaan), yang mana ketiganya merupakan jembatan menuju ekonomi baru Indonesia (Lindblad 2008: 3-6; Wasino 2016: 64; Kanumoyoso 2001: 69).

Selama ini, narasi sejarah tentang nasionalisasi perusahaan jika tidak merupakan penjelasan tentang signifikansi di bidang ekonomi buntut dari membunahnya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Belanda. Bentuk lainnya merupakan narasi nasionalistis, khususnya berhubungan dengan kepemilikan otoritas pemerintah berkaitan pada hilirisasi perusahaan-perusahaan tersebut sebagai urat nadi ekonomi negara. Sementara itu, berbagai elemen politik yang saling bertemu pada lini masa akhir 1950-an sebagai faktor determinan dalam kelahiran kebijakan nasionalisasi perusahaan juga perlu diketengahkan. Misalnya, pengesahan UU No. 74 Th. 1957 tentang “Penetapan Keadaan Bahaya” menjadi tengara terjadinya peningkatan peran militer dalam seluk-beluk pengaturan kenegaraan. Selaras dengan penelitian ini, produk hukum tersebut merupakan

legalisasi *cum* pintu gerbang atas campur tangan militer terhadap perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi.

Munculnya peran militer dalam kepengurusan perusahaan pasca dinasionalisasi dapat dimaknai bahwa telah terjadi militerisasi. Akan tetapi, sebelum sampai pada kesimpulan tersebut, perlu dipahami bahwa militerisasi merupakan kondisi di mana Militerisme sebagai paham yang berasal dari institusi militer mendominasi atau setidaknya menghegemoni berbagai relung kegiatan di luar bidang kemiliteran, dalam hal ini perusahaan hasil nasionalisasi. Eric Nordlinger (1997: xi) menyebut terdapat dua faktor berpengaruh terjadinya militerisasi. *Pertama*, berasal dari internal lembaga, meliputi; komando hierarki, tingkat profesionalisme, kepentingan lembaga, termasuk juga kelas sosial personil, identitas kolektif, identitas individu, dan sikap politik. *Kedua*, berasal dari eksternal meliputi; aksi atau manuver dari pemimpin eksekutif (khususnya sipil), pengaruh dan legitimasi pemerintahan sipil, sikap politik rakyat (pekerja dan petani), intensitas konflik horizontal, taraf sosial dan ekonomi. Selaras dengan itu, historisitas lembaga militer Indonesia terkait pada profesionalisme, kepentingan, kelas sosial, identitas, maupun relasinya dengan pemimpin eksekutif dan keprihatinannya menyoal pada konstelasi sosial-ekonomi 1950-an, mengerucut pada eksistensi dua kubu (berlawanan) dalam institusi militer. Masing-masing kubu beserta pandangan politik dikotomis tersebut bermuara pada terjadinya intervensi militer kepada institusi di luar bidang konvensionalnya (Sundhaussen 1988: 39; Crouch 1999: 27; Feith 2007: 113).

Hingga kini, baik penelitian historis maupun ilmu sosial yang menaruh fokus pada militer Indonesia sebagai subjek utama dalam narasi utuh terjadinya militerisasi pada perusahaan hasil nasionalisasi sebagai ruang spasial aktif belum banyak dilakukan. Berlokus di PG Gondang Baru, Klaten, artikel ini menempatkannya sebagai ruang spasial aktif tempat terjadi pertemuan *cum* pertarungan antar kepentingan, baik oleh negara, militer maupun rakyat (tani *cum* pekerja). Bersandar pada uraian latar belakang, maka pokok permasalahan artikel ini akan membahas dampak-dampak yang timbul akibat campur tangan militer dalam kepengurusan PG Gondang Baru di Klaten pasca dinasionalisasi hingga satu

dekade setelahnya—sekaligus sebagai batas antar rezim pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Selanjutnya, permasalahan tersebut diuraikan melalui pertanyaan: *pertama*, apa saja bentuk keterlibatan militer dalam kepengurusan perusahaan PG Gondang Baru? *Kedua*, bagaimana dampak yang timbul akibat keterlibatan militer dalam kepengurusan perusahaan?

Adapun penelitian berkaitan tentang munculnya keterlibatan institusi militer Indonesia di bidang ekonomi secara umum telah dilakukan, baik dari disiplin ilmu sosial maupun humaniora. Bambang Purwanto menerangkan dalam artikel yang berjudul *Economic Decolonization and The Rise of Indonesian Military Business* bahwa keterlibatan militer Indonesia di bidang ekonomi merupakan realitas yang turut muncul seiring Proklamasi. Selanjutnya, perihal modernisasi institusi militer dijelaskan Farabi Fakhri dalam disertasi yang kemudian dibukukan oleh penerbit Brill dengan judul *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965)*, menurutnya pada periode 1950-an hingga 1965 tengah terjadi transformasi institusi militer Indonesia menjadi kelompok teknokrat yang kemudian aktif dalam kepengurusan baik pemerintahan maupun perusahaan negara hasil nasionalisasi. Hal tersebut dilatari oleh eratnya relasi Indonesia dengan Amerika sepanjang 1950-an. Karya Farabi ini melengkapi perspektif dari dalam institusi militer Indonesia, seperti diterangkan oleh Bradley Simpson (2008) dalam buku yang berjudul *Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S. Indonesian Relation* melalui kerangka bilateral memanfaatkan arsip-arsip Amerika yang telah dideklasifikasi.

Beberapa penelitian akademis di bidang sejarah telah menempatkan perusahaan Pabrik Gula Gondang Baru di Klaten sebagai lokus pengamatan adanya perubahan radikal dalam kepengurusan manajerial setelah nasionalisasi dilakukan. Seperti dalam skripsi Deny Wahyu Hidajat yang berjudul *Pabrik Gula Gondangwinangoen di Klaten 1945-1960*, Aisyah Alexandra Adriana yang berjudul *Perkembangan Industri Gula di Klaten, Jawa Tengah: Studi Kasus PT Pabrik Gula Gondang Baru 1957-1969*, artikel jurnal Yosef Denta Pradana yang berjudul *Pengaruh Nasionalisasi Terhadap Perkembangan PG Gondang Winangun Tahun*

1957-1964, dan tesis Heru Suyitno yang berjudul *Pabrik Gula Gondangwinangoen Sebelum dan Sesudah Nasionalisasi Tahun 1950-1963*. Akan tetapi, agaknya penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut umumnya jatuh pada generalisasi narasi sejarah sosial-ekonomi otoritatif, yang mana hanya memandang nasionalisasi sebagai suatu kebijakan negara. Linier dengan itu pembahasan yang muncul jika tidak menyoal tentang perubahan struktur manajerial yang berkaitan dengan teknis produksi gula, atau lebih jauh dari itu tentang hasil produksi sebagai muaranya. Padahal merujuk pada konteks politik nasional saat kebijakan nasionalisasi berjalan, ditandai oleh berlakunya UU Keadaan Bahaya tengah terjadi penetrasi militer dalam usaha pelibatangannya di bidang selain pertahanan yang esensial untuk mendapat sorotan terkait peranannya terhadap perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi.

## **METODE**

Pengetengahan pembahasan politik militer penting kiranya dalam pembahasan sejarah, khususnya berkaitan pada aktivitas perusahaan pasca dinasionalisasi pada 1957. Pasalnya, keterlibatan militer baik secara substansial maupun minor dalam struktur perusahaan seyogianya bermuara pada sektor produksi, pengalokasian ekonomi, sosial dan politik (Watson & Danopoulos 1996: xii). Maka, “sejarah perusahaan” digunakan sebagai perspektif determinan dalam artikel ini untuk melakukan rekonstruksi sekaligus sebagai pelengkap metode penelitian sejarah yang telah baku. Kuntowijoyo menerangkan bahwa dalam penelitian sejarah kritis terdapat empat tahapan yang harus dilewati sejarawan, yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Keseluruhan tahapan tersebut selayaknya diterapkan sebagai pedoman, pun sebagai asas kesahihan narasi yang ditelurkan sejarawan merupakan produk keilmuan (Kuntowijoyo 2018: 73-83). Melalui penelusuran catatan dan laporan, baik formal maupun non-formal dalam lingkup perusahaan Gondang Baru semestinya akan mengarahkan penulis untuk melihat berbagai dampak yang timbul dari keterlibatan militer sebagai salah satu penentu aktivitas produktif perusahaan (Hidy 2016: 2016). Data-data kuantitatif yang merujuk pada aktivitas produksi perusahaan, seperti Laporan Tahunan akan

diselaraskan dengan sumber-sumber relevan, baik yang didapat melalui penelusuran surat kabar sezaman, narasi saksi sejarah melalui wawancara, maupun berbagai penelitian yang telah dilakukan, dengan kata kunci “sejarah agraria, perkebunan di Klaten dan (secara eksklusif) PG Gondang Baru”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pasang-Surut Produksi Gula Gondang

Paruh kedua abad ke-19, tepatnya tiga dekade setelah Perang Jawa dipadamkan pemerintah kolonial ialah tengara bahwa telah terjadi pergeseran perihal keterbukaan *Vorstenlanden* terhadap kapital dan para pemodal Belanda. Di Klaten yang saat itu bagian wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta didirikan *Suikerfabriek Gondangwinangoen* pada 1860 di bawah naungan perusahaan perkebunan NV. Klatensche Cultuur Maatschappij yang berkedudukan di Belanda (Amsterdam), sedangkan kepengurusan (harian) manajerial dipegang NV. Mirandolle Voute & Co di Semarang. Secara umum, di *Vorstenlanden* dapat tergambar melalui jumlah perusahaan milik Belanda yang senantiasa bertambah, semula pada 1847 hanya terdapat 47 industri perkebunan, bertambah menjadi 79 pada 1864, hingga pada 1879 tercatat sebanyak 102 industri perkebunan yang aktif di bekas wilayah Mataram Islam ini (Suhartono, 1990: 153)

Wilayah *Vorstenlanden* dipilih oleh para pemodal untuk mendirikan perusahaan-perusahaannya lantaran, adanya bonus demografi, kualitas tanah yang baik, pun juga tidak bisa dikesampingkan berlakunya hukum tradisional sebagai pedoman masyarakat berkaitan dengan hak kepemilikan dan pemakaian tanah. Kelindan ketiga hal ini merupakan peluang bagi industri perkebunan yang dimotori oleh modal dari luar. Terjadinya konsesi persewaan tanah dengan mengindahkan sistem hukum tradisional, maka akan serta-merta menyeret rakyat (tani) yang bernaung di bawahnya menjadi pekerja. Alhasil, industri perkebunan tidak perlu bersusah payah mengeluarkan sumber daya lebih untuk ketersediaan pekerja. Hal ini ditunjukkan melalui fantastisnya angka produksi pun kuantitas perusahaan pada suatu daerah *Vorstenlanden*—sekarang Yogyakarta dan Surakarta. Berikut data hasil produksi perusahaan gula yang berdiri atas sistem sewa tanah pada 1894:

**Tabel 1. Hasil Produksi Pabrik Swasta Gula di Yogyakarta dan Surakarta Tahun 1894 Berdasar Satuan Pikul**

Surakarta	Gondangwinangoen	52.500
	Prambonan	29.000
	Tjandi-sewoe	27.500
	Delanggoe	50.000
	Kartasoera	27.000
	Tjepper	35.000
	Wonosari	20.400
	Banjak Pengging	27.271
	Djongkare of Karang-anom	34.000
	Gedaren	23.584
	Ponggok	17.000
	Tjokro-toeloeng	33.100
	Gondangrawe	20
	Triangan	27.000
Yogyakarta	Beran	47.106
	Klatji	30.000
	Melati en Tjebongan	39.400
	Padakan	52.000
	Rewouloer	52.000
	Sedajoe	11.000
	Tegalweroe	37.300
	Barongan	70.000
	Plered en Kenalan	31.000
	Randogoenting	25.210
	Tandjoeng-Tirto	48.002
	Bantool	63.400
	Gesiekan	50.500
	Liepoero	45.000
	Poendong	40.000
Sewoegaloer	76.000	

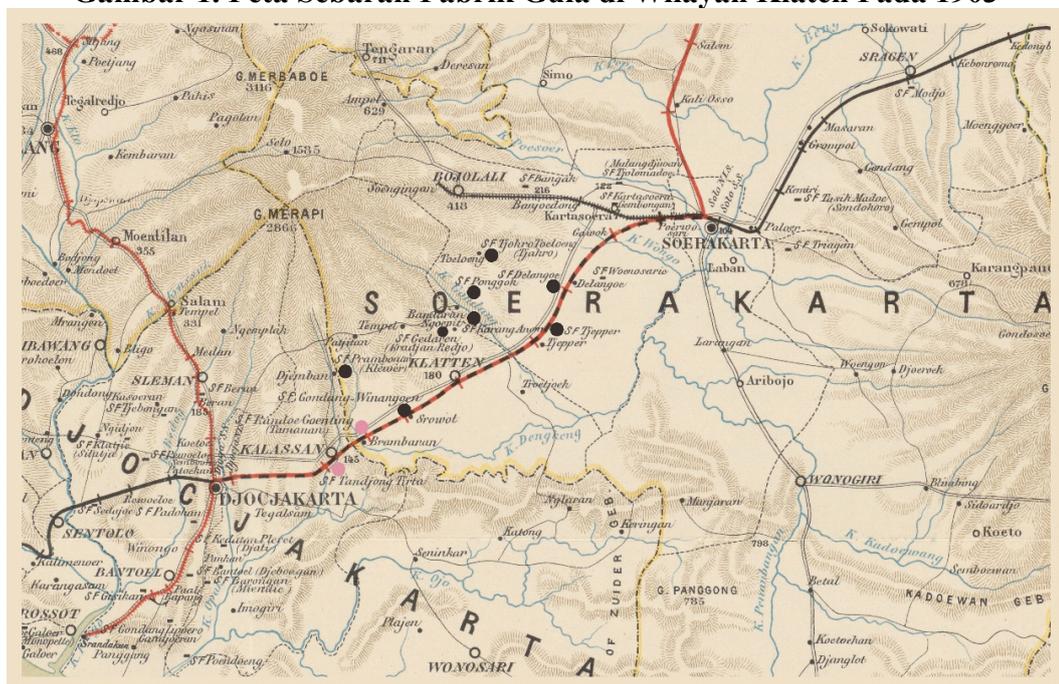
Sumber: *Aantooning van de Hoeveelheden Door Eigenaars van Landbouw-Ondernemingen in Nederlandsh-Indie in 1894*, Batavia: Landsdurkkerij, 1895, hlm. 37.

Berkat pertalian antara dua sistem paradoksal tersebut, berdasar catatan di akhir abad ke-19 Gondangwinangoen merupakan perusahaan gula berbasis perkebunan di tanah konsesi (sewa) paling produktif di Surakarta. Sementara itu, di kedua wilayah *Vorstenlanden*, Gondangwinangoen menempati urutan keempat di bawah perusahaan gula Sewoegaloer, Barongan, dan Bantool. Tingginya angka produksi gula di Gondangwinangoen sebagai representasi berhasilnya pertautan

sistem yang berangkat dari alam berpikir dikotomis; antara modern dan tradisional, yang bermuara pada luasnya konsesi sewa tanah dan hasil produksi gula.

Berdasar wilayah administrasinya dari total empat belas pabrik gula swasta dengan sistem konsesi sewa tanah, lebih dari setengahnya atau sembilan pabrik gula berada di wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, dua pabrik gula Randogoenting dan Tandjoeng-Tirto yang eksis di bantaran sungai Opak menandakan bahwa struktur tanah di wilayah Klaten dan daerah lain di dekatnya, khususnya yang berhulu Gunung Merapi merupakan tanah yang sesuai untuk tanaman tebu. Sebagai bukti, bila diakumulasikan hasil produksi gula dari tanah yang telah disebut mencapai 374.896 pikul, atau sebanyak 23,5 juta kilogram gula setiap tahunnya. Tentu, angka tersebut cukup signifikan apabila hanya mengacu pada suatu wilayah dan struktur tanah yang tipikal, yang merupakan satu bagian kecil dari bentangan daerah *Vorstenlanden*.

**Gambar 1. Peta Sebaran Pabrik Gula di Wilayah Klaten Pada 1903**



Sumber: DE 32, 1, Digital collections: Leiden University Libraries

Selanjutnya, setelah proses panjang menuju kelahiran negara Indonesia hingga diakuinya kedaulatan oleh Belanda pada kurun 1950-an, dari sembilan pabrik gula yang semula aktif pada masa kolonial di Klaten, hanya tersisa dua

pabrik saja pada pertengahan tahun 1950-an; Gondangwinangoen dan Tjeper. Agaknya, data hasil produksi di akhir abad ke-19 tersebut selain memberi gambaran tentang kecocokan tanah di daerah yang berhulu Gunung Merapi juga sebagai tanda bahwa Gondangwinangoen merupakan perusahaan yang cukup baik secara manajerial. Sebagai bukti aktivitas Gondangwinangoen hanya berhenti selama terjadi fenomena luar biasa, seperti krisis ekonomi dunia pada 1930-an (mengakibatkan berhenti aktivitas selama lima tahun, 1930-1935) dan masa revolusi (tidak ditemukan data produksi sepanjang kurun masa ini).

Perang Revolusi berakhir di meja perundingan KMB pada Desember 1949 yang diratifikasi di Den Haag, Belanda. Peristiwa ini selain dapat dimaknai sebagai pengakuan kedaulatan politik Indonesia terhadap Belanda, juga dapat dimaknai secara terbalik bahwa pada spektrum ekonomi pemberian konsesi terhadap perusahaan Belanda untuk kembali aktif di Indonesia memiliki arti akan kondisi *dependence* (kebergantungan) alih-alih *independence* (kedaulatan). Salah satu perusahaan-perusahaan yang aktif kembali tersebut ialah *Suikerfabriek Gondangwinangoen*, secara berturut hingga tahun 1957 kepengurusannya pada jabatan administratur dipegang oleh M.F.H. Breemers, Tn. Van Beneiden, dan G.F. Bernet. Tidak seperti saat pemerintahan kolonial Belanda masih eksis, produksi Gondangwinangoen pada lini masa ini jauh berada di bawah dibanding saat masa keemasannya sebelum Perang Pasifik menjalar hingga Indonesia. Barangkali, faktor inilah sebagai penyebab proses nasionalisasi Gondangwinangoen tidak berjalan alot, tidak seperti nasionalisasi perusahaan esensial seperti pelayaran KPM yang dibumbui dengan siasat-siasat Belanda agar tidak semakin dalam jatuh pada lubang kerugian.

Secara resmi peralihan kepengurusan atas perusahaan gula ini terjadi pada 1958 ditandai oleh R. Imam Supeno, seorang Indonesia yang ditunjuk sebagai administrator. Hal mana jabatan ini sebelumnya seperti yang telah disebut di atas selalu diisi oleh orang Belanda, menandai bahwa melalui program nasionalisasi pada akhir 1957 praksis Indonesianisasi dapat berjalan secara menyeluruh sampai posisi tertinggi. Proses peralihan kepengurusan perusahaan ditangani oleh Resimen Infanteri 15 yang sebelum 1952 bernama Brigade Panembahan Senopati melalui

penempatan seorang Perwira Pengawas Perusahaan yang berada di bawah naungan Staf Penguasa Militer Diponegoro (Purwanto 2009: 53). Walaupun berbagai struktur dalam rencana penyelenggaraan peralihan kepengurusan telah dibuat, agaknya tidak menghindarkan keterlambatan yang terjadi dari rencana yang dijadwalkan oleh Staf Penguasa Perang Militer Diponegoro melalui “Surat Perintah No. SP-PM/00153/12/1957” agar selambat-lambatnya terlaksana pada 26 Desember 1957. Berdasar “Berita Acara Timbang Terima Berupa Materiel” realisasi penyerahan terjadi sepekan setelahnya atau pada 2 Januari 1958. R. Imam Supeno selain dipilih sebagai administratur juga dipercaya untuk memegang kepemimpinan N.V. Mirandolle Voute di Semarang sebagai pengawas manajemen PG Gondang baru. Selanjutnya, Kementerian Pertanian melalui “Keputusan No. 229/Um/1957” menyatakan bahwa kepengurusan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi, termasuk PG Gondang Baru di dalamnya, akan diserahkan kepada PPN-Baru.

Peralihan yang ditandai perubahan nama menjadi PG Gondang Baru tersebut seakan menjadi udara segar atas terpuruknya iklim ekonomi di Indonesia sepanjang satu dekade setelah Proklamasi 1945. Pasalnya, perusahaan yang semula merupakan salah satu sumber esensial penghasil profit negara Kolonial di sektor perkebunan di Jawa bagian pedalaman ini, kini dengan kepengurusannya yang sudah berada di tangan pemerintah harapannya akan mengalirkan profit bagi Indonesia. Akan tetapi, terdapat hal yang secara signifikan sebagai pembeda antara kepengurusan sebelum dan sesudah nasionalisasi. Jika kepengurusan oleh Belanda tujuan utama perusahaan hanya untuk menghasilkan profit tanpa disertai kepentingan sosial, berdasar “Perppu No. 19 Th. 1960”, dengan statusnya sebagai perusahaan negara yang melekat kini kepentingan sosial berada pada posisi yang sama dengan tujuan untuk menghasilkan profit. Berikut data kuantitas produksi PG Gondang Baru sepanjang hampir dua dekade dari tahun 1950-1967, pun juga sebagai perbandingan antara di bawah kepengurusan Belanda dengan Indonesia;

**Tabel 2. Data Produksi PG Gondang Baru Sebelum dan Sesudah Nasionalisasi**

Tahun	Luas Areal (Ha)	Hasil Tebu (Kuintal)	Hasil Produksi Gula (Kuintal)
1950	461,1	394,701	53.481,9
1951	603,6	454,51	55.632,0
1952	502,5	593,452	78.436,6
1953	404,1	368,448	47.493,9
1954	661,5	723,881	89.446,9
1955	260	152,36	18.085,1
1956	416,6	340,362	45.744,6
1957	836	511.632	63.135,3
1958	1019,7	774.972	99.971,3
1959	1076,1	772.640	97.893,4
1960	1016,4	704.527	89.633,3
1961	1626,8	1.092.289	113.963,9
1962	1340,7	1.123.070	135.279,0
1963	1188,3	947.462	91.229,8
1964	1187,6	984.699	121.799,1
1965	1234,9	927.497	106.675,2
1966	1495,8	1.512.322	186.570,1
1967	1085,3	1.249.941	116.509,7

Sumber: Koleksi perpustakaan PG Gondang Baru.

Keterangan: Tabel dengan warna kolom abu-abu merujuk pada kepengurusan pemerintah Indonesia.

Nampak jurang yang cukup lebar sebagai pemisah antara hasil produksi gula sebelum dan sesudah nasionalisasi dilaksanakan. Jika dibandingkan, angka terbesar yang dicapai pada 1954 –saat perusahaan masih berada dalam kepengurusan Belanda– masih kurang dari hasil produksi terendah –saat kepengurusan sudah diambil alih Indonesia– pada 1960. Pun, juga nampak pada tahap paling awal produksi yaitu terkait konsesi sewa tanah. Sebelum perusahaan dinasionalisasi angka tertinggi tidak pernah menyentuh 1.000 hektar (ha), yang

mana setelah nasionalisasi angka 1.000 ha merupakan angka konsesi sewa tanah terendah dalam kurun satu dekade.

Selain itu, berdasar data di atas secara banal dapat terlihat adanya batas merujuk pada signifikansi luasan tanah konsesi maupun hasil produksi tebu dalam kepengurusan pemerintah Indonesia, yaitu antara kurun 1957-1960 dengan 1961-1967. Melalui batas antar kurun tersebut dapat disimulasikan perhitungan yang berasal dari;

**Gambar 2. Visualisasi Perhitungan Rasio Produktivitas**

$$\left( \frac{\begin{array}{c} \text{Rata-rata hasil tebu} \\ \text{(1961-1967)} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Rata-rata konsesi tanah} \\ \text{(1961-1967)} \end{array}} - \frac{\begin{array}{c} \text{Rata-rata hasil tebu} \\ \text{(1957-1960)} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Rata-rata konsesi tanah} \\ \text{(1957-1960)} \end{array}} \right) \times 100$$

Hasil bagi antara rata-rata produksi tebu dengan rata-rata luasan tanah konsesi merupakan angka produktivitas penanaman masing-masing kurun waktu. Selanjutnya selisih kedua kurun waktu–hasil dari pengurangan kurun waktu kedua dengan kurun waktu pertama – dikali 100, akan didapat persentase kenaikan produktivitas penanaman PG Gondang Baru dalam bentuk selama satu dekade. Hasilnya, rata-rata hasil tebu pada kurun pertama dibanding rata-rata hasil tebu pada kurun kedua (690.942 : 1.119.611), dan rata-rata konsesi tanah pada kurun pertama dibanding rata-rata konsesi pada kurun kedua (987,05 : 1.345,68). Diketahui dengan batasan kurun waktu tersebut terdapat kenaikan sebanyak 18% rasio produktivitas penanaman. Hal senada juga dialami pada sektor produksi gula di PG Gondang Baru. Lalu, pertanyaan selanjutnya, mengapa hal ini bisa terjadi?

### **B. Militerisasi: Struktur Penting Penopang Produksi PG Gondang Baru**

Layaknya jamur berkembang usai hujan menerpa, berbagai organisasi massa dan partai lahir-berkembang usai Proklamasi 1945 dibuntuti oleh meruncingnya sentimen terhadap Belanda. Kondisi demikian didukung oleh adanya

berbagai produk hukum yang muncul secara berkala. Salah satu yang paling penting ialah hak atas kepemilikan tanah, kini rakyat sebagai pemilik tanah mempunyai preferensi penuh untuk menyewakan atau mengerjakan tanahnya sendiri. Faktor inilah yang secara linear berakibat pada produksi perusahaan-perusahaan agrikultural Belanda yang beroperasi melalui konsesus KMB hingga dinasionalisasi pada 1957.

Di samping itu, hal identik lain sebagai konteks pasca perang ialah terpuruknya ekonomi nasional yang melanda di hampir seluruh wilayah. Kelangkaan kebutuhan pokok, khususnya pangan, seperti beras dan gula menahun terjadi di Yogyakarta dan Klaten (*Harian Rakjat*, 12 Juni 1957; 29 November 1958; 2 Oktober 1959). Sebuah konsekuensi logis jika partai-partai ditunjuk sebagai dalang atas semakin keruhnya konstelasi politik-ekonomi di Indonesia 1950-an. Sukarno dalam pidatonya yang diberi judul “Menyelamatkan Republik Indonesia” secara terang memberi kritik menysasar partai-partai atas situasi ini, “alih-alih mengusulkan ide untuk perubahan mendasar, partai-partai yang mewakili parlemen hanya bisa mengusulkan reshuffle kabinet” hardiknya pada 21 Februari 1957 di Jakarta (David Reeve: 2013, 127).

Berbanding terbalik dengan partai-partai yang posisinya mulai terdiskreditkan, pada medio kedua 1950-an melalui UU Keadaan Bahaya institusi militer malah mendapat angin segar untuk melebarkan sayap di bidang selain pertahanan. Secara spesifik keterlibatan militer di bidang selain pertahanan dapat dilihat melalui perannya selama aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang mulai digelar pada akhir 1957. Melalui “Surat Perintah Penguasa KASAD No. S.P./P.M./077/1957” penguasa militer Angkatan Darat (AD) menginstruksikan kepada jajaran hierarki di bawahnya untuk mengambil peran dan pengamanan atas seluruh perusahaan Belanda yang diambil-alih. Hal ini dilakukan supaya tidak dimanfaatkan pihak lain, khususnya pihak komunis. Pada babak selanjutnya, “Laporan Sub Panitia Nasionalisasi” menyebut bahwa selama proses pengambilalihan perusahaan panitia berhasil mencegah perusahaan-perusahaan dari potensi terhentinya produksi. Hal menarik sebagai penjelas atas keberhasilan tersebut ialah adanya penempatan seorang Perwira AD di bawah instruksi “Badan

Pengawas Perusahaan Belanda” yang secara krusial berperan untuk menjaga arus produksi. Realitas ini selanjutnya bermuara pada terbitnya putusan pimpinan AD, “mengenai adanya kemungkinan bagi para anggota (militer) yang tidak lagi memenuhi syarat keprajuritan untuk disalurkan sebagai tenaga AD kepada masyarakat melalui perusahaan hasil nasionalisasi” (*Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI*, No. 1809).

Konteks tersebut sedikitnya telah menerangkan upaya untuk membaca secara berjarak data kuantitatif hasil produksi PG Gondang Baru pada sub bab sebelumnya. Perusahaan hasil nasionalisasi kini tidak hanya sebagai lokus Kapitalisme modern saja, melainkan juga sebagai medan pertem(p)u(r)an baru berbagai kepentingan politik. Saling silang kepentingan antara organisasi massa maupun partai ialah tanda telah terjadi ruralisasi politik di Indonesia pada 1950-an (Padmo 1995: 61). Sengkarut persoalan politik baik yang secara horizontal antar partai dan organisasi massa, maupun vertikal antara lembaga otoritas dengan rakyat menjadi lazim terjadi di perdesaan. Dalam situasi centang perenang ini rakyat (tani) tampil senantiasa sebagai subjek hidup dalam diskursus perusahaan perkebunan, menempatkannya pada keadaan untung walau tidak jarang buntung. Bagian artikel ini akan mempraktikkan upaya pembacaan dari hasil padu antara dokumen resmi yang telah disebut sebelumnya dengan berbagai dokumen lain maupun sumber sezaman untuk melihat peranan krusial militer di PG Gondang Baru khususnya pada sektor produksi gula dalam kurun satu dekade.

Dalam “Laporan Tahunan 1958” misalnya, secara terang disebut terdapat anggota militer yang telah pensiun berpangkat Letnan I bernama Darmoatmodjo yang ditempatkan menjadi kepala Bagian Keamanan. Laporan ini juga menyebut bahwa se usai serah terima kepengurusan baru perusahaan kepada pemerintah masih terdapat sebanyak sembilan rumah dinas milik pabrik yang ditempati oleh militer. Walau tidak secara langsung terkait pada sektor produksi, akan tetapi akibat dari penggunaan rumah dinas tersebut pabrik harus memberi uang sewa ganti kepada sembilan staf pekerja yang belum mendapat fasilitas sebanyak Rp. 75 hingga Rp. 90. Pada laporan ini juga tampil Serikat Buruh Gula (SBG) sebagai kelompok yang paling sering berseru berhadap-hadapan dengan pihak manajemen PG Gondang

Baru untuk kemaslahatan buruh. Dari total sebelas perselisihan pada 1958, SBG tercatat tidak pernah absen sebagai organisasi yang membersamai aksi protes, baik buruh kontrak maupun pekerja staf. Sementara itu, organisasi buruh lain dalam lingkungan PG Gondang Baru, seperti Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) dan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) sama sekali tidak muncul dalam laporan.

Penempatan seorang bekas militer Letnan I Darmoatmodjo sebagai kepala Bagian Keamanan pabrik merupakan hal penting yang diketengahkan dalam artikel ini untuk menelaah berbagai aspek terkait produksi perusahaan. Bagian Keamanan sebagai struktur dari dalam pabrik bertugas untuk membidani strategi-strategi demi mencapai efisiensi produksi, seperti upaya untuk meredam pencurian tebu, pengamanan ketersediaan tanah konsesi, dan hal lain terkait produksi tebu maupun gula. Kerja-kerja pengamanan Bagian Keamanan tidak dijalankan secara kaku melainkan berjalan secara fleksibel dengan berbagai skema kerjasama dan nama selaras dengan fungsinya.

Pencurian tebu merupakan persoalan menahun selama perusahaan ini aktif kembali pasca perang. Saat perusahaan belum dinasionalisasi pada 1956 tercatat sebanyak 259,95 ha dari 416,6 ha seluruh tanah konsesi atau sebanyak 49% areal penanaman tebu pabrik sirna akibat aktivitas merugikan ini. Hal senada juga terjadi di masa awal kepengurusan manajemen setelah PG Gondang Baru dipegang pemerintah Indonesia, sebanyak 798,17 ha atau sekitar 35,65% dari keseluruhan tanah konsesi milik perusahaan hilang akibat pencurian. Manajerial perusahaan dalam pertanggungjawabannya menguraikan penyebab-penyebab pencurian tebu seperti, untuk bahan makanan pengganti karena kelangkaan di pasar, dijual kepada tengkulak dan/atau produsen gula mangkok, kayu bakar, dan makanan ternak (sapi dan kerbau).

Sebagai respons manajemen menutup tahun 1958 dengan membentuk “Staf Komando Keamanan Tebu PG Gondang Baru” pada bulan Desember. Organisasi ini bertugas mengamankan tanaman tebu baik melalui tindakan preventif maupun represif, yang mana di dalamnya duduk militer dengan jabatan Pembantu Pelaksana Kuasa Perang (Pepekuper), kepala daerah Bupati dan para

Wedana, Kepala Polisi, Kepala Kejaksaan, dan Administratur perusahaan dengan dibantu beberapa stafnya, khususnya bagian keamanan untuk memberikan penerangan kepada rakyat di sekitar tanah konsesi. Eksisnya organisasi ini di masa tanam selanjutnya mengisyaratkan bahwa pencurian tebu merupakan ancaman terbesar dan sekaligus menahun sekalipun kepengurusan telah berada di tangan pemerintah Indonesia.

Jika sebelumnya pada musim tanam 1958, selama 7 bulan merentang dari Januari hingga Juni, aktivitas pengamanan tanaman tebu di PG Gondang Baru bertumpu pada “Korps Penjaga Tanaman Tebu” yang dikepalai Darmoatmodjo dengan membawahi panitia keamanan di setiap desa di mana terdapat tanah konsesi dibantu oleh tenaga dari Militer, Kepolisian dan Pamong Praja lainnya menghabiskan tidak kurang dari Rp. 400.000. Musim tanam selanjutnya pada 1959 setelah dibentuk Staf Komando Keamanan Tebu walau komponen praksis pelaksanaan kurang lebih sama, akan tetapi terkait pengaturan dan pendanaan telah diatur secara rigid. Adapun rincian skema pembiayaan Staf Komando Keamanan Tebu sebagai berikut, (*Laporan Tahunan 1958-Bagian Keamanan*, 1958: 5):

Kepada desa-desa Rp. 30 setiap ha per bulan terhitung mulai Januari 1959 sampai tebu ditebang.

Kepada staf-staf komando asistenan;

Januari - Maret 1959	Rp. 15 setiap ha setiap bulan
April - Mei 1959	Rp. 20 setiap ha setiap bulan
Juni	Rp. 25 setiap ha setiap bulan

Kepada staf komando kawedanan Rp. 5 setiap ha per bulan selama 7 bulan.

Kepada staf komando kabupaten Rp. 6.000 setiap bulan.

Kepada bagian penerangan Rp. 9.000 setiap bulan.

Sayangnya hingga tulisan ini dimuat, penulis tidak menemukan jumlah pasti keanggotaan Staf Komando Keamanan Tebu PG Gondang Baru. Akan tetapi, angka perhitungan yang paling masuk akal berkaitan dengan jumlah keanggotaan staf komando asistenan dengan merujuk pada penyebutan “asistenan” yang mengacu pada keterwakilan suatu areal penanaman tebu. Terdapat lima jumlah kesinderan yang terdiri dari; Joton, Gempol, Demangan, Ketandan, dan Jetis/Ceper.

Jika disimulasikan dengan memasukkan luasan tanah konsesi pada 1959; sebesar 1076,1 ha, dan keanggotaan staf komando asistenan yang berjumlah lima orang, maka besaran pembiayaan selama masa tanam 1959 di PG Gondang Baru ialah Rp. 875.340. Terlihat cukup jauh selisih pembiayaan pengamanan tanaman tebu antara tahun 1958-1959, hal ini diamini oleh Sdr. Hantijo perwakilan PG Gondang Baru pada Seminar Gula pertama (30 Januari - 2 Februari 1961), menurutnya biaya pengamanan yang besar ini cukup berhasil untuk menurunkan persentase pencurian (*Resume Rapat Seksi I*, 1961: 11). Keberhasilan tersebut mengacu pada berbagai berbagai cara yang dimaksudkan untuk membuat jera seperti, hukuman di tempat atau pemenjaraan yang ditimpakan kepada aktor pencurian tebu di PG Gondang Baru. Akan tetapi, tidak semua pabrik gula mengalami hasil linear atas usaha pengamanan yang dikerahkan, diutarakan oleh Sdr. Soeparto dari PG Wonolangan dari Probolinggo misalnya, saking jengkelnya terhadap aksi pencurian tebu ia mengusulkan untuk mempersenjatai korps keamanan agar lebih berani menindak pelaku. Adapun data persentase pencurian PG Gondang Baru sebagai berikut.

**Tabel 3. Persentase Pencurian Tanaman Tebu PG Gondang Baru**

Tahun	Gondan g Baru
55/56	49,41
56/57	18,98
57/58	35,65
58/59	23,12
59/60	4,33
60/61	7
61/62	24,97
62/63	5,53
63/64	11,2
64/65	4,03
65/66	3,21
66/67	1,06
67/68	1,24

Sumber: *Laporan Tahunan 1969 PNP XVI Sala*, 1969: 74 & *Laporan Tahunan 1958-Bagian Keamanan*, 1958: 5

Berdasar data persentase pencurian tebu selama satu dekade kepengurusan di PG Gondang Baru nampak dua fase yang dibatasi musim tanam 1961/62. Fase pertama, sepanjang enam tahun pertama rasio naik-turunnya angka persentase pencurian cenderung tidak stabil. Misalnya, pada musim tanam 1960/61 persentase pencurian hanya terjadi 7% dari keseluruhan luasan tanah konsesi sebesar 1.626,8 ha yang merupakan angka konsesi sewa tanah terbesar sepanjang satu dekade kepengurusan. Satu tahun selanjutnya, persentase pencurian kembali naik melebihi angka pada musim tanam dua tahun usai perusahaan dinasionalisasi yang mencapai 24,97%, padahal luasan tanah konsesi lebih kecil dibanding tahun sebelumnya sebesar 1.340,7 ha. Diyakini oleh Soegijanto Padmo, hal ini terjadi lantaran secara umum eksistensi tanaman tebu tengah turun popularitasnya dibanding tanaman tembakau dan beberapa daerah yang lebih memilih untuk menanam bawang merah. Alhasil, pabrik hanya mendapatkan tanah sisa yang cenderung tidak bagus kualitasnya untuk ditanami tebu sehingga berpengaruh terhadap kuantitas gula dihasilkan, lebih-lebih tanah tersebut letaknya terpencar-pencar sehingga upaya pengamanan mengalami kesulitan (Padmo 2000: 56).

Fase kedua, dalam kurun lima tahun diawali musim tanam 1962/63 hingga 1967/68 angka pencurian relatif kecil dan jurang fluktuasi setiap tahun lebih sempit dibanding fase sebelumnya. Baik persentase pencurian maupun luasan tanah konsesi, keduanya menunjukkan adanya kestabilan. Hal ini dilatari oleh pembentukan “Panitya Inti Perumus/Pengusul Sewa Tanah dan Rayoneering Daerah Kabupaten Klaten” usai musim tanam 1963. Kepanitiaan yang berisi jajaran pamong praja dan eksekutif perusahaan, seperti; Wedana Gondangwinangun, Kota Klaten dan Delanggu, Ketua DPRD Klaten, Kepala Jawatan Agraria Klaten, dan para pimpinan PPN dalam wilayah Klaten meliputi; Tembakau dan dua PPN Gula (Gondang dan Ceper) (Soegijanto Padmo, 2000: 57). Utamanya kepanitiaan ini bertugas untuk menentukan besaran harga sewa (tetap) satu kali masa tanam di wilayah Klaten, pun fungsi lainnya untuk memetakan sekaligus memilah tanah yang akan disewa, terutama antara Perusahaan Gondang Baru dengan PPN Tembakau yang secara geografis berdekatan.

Eksisnya Panitia Inti Perumus/Pengusul Sewa Tanah dan Rayoneering menjadi jawaban atas rendahnya harga sewa tanah yang berpengaruh pada besar atau kecilnya luasan tanah konsesi perusahaan di suatu masa tanam. Sepanjang satu dekade lebih setelah pemerintah Indonesia eksis, sejak perusahaan sebelum dan sesudah dinasionalisasi keadaan yang melekat dalam penggambaran ekonomi sosial masyarakat ialah harga-harga kebutuhan dan produksi yang tiarap. Pemerintah memberikan respons khususnya bagi rakyat (tani) pemilik lahan, lebih-lebih yang tidak berlahan melalui pengesahan Undang-undang No.5 atau yang populer disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada 1960 yang mengatur soal redistribusi. Pengesahan UUPA menandai adanya struktur baru yang berpengaruh terhadap realitas sosial, ekonomi, dan politik agraria, khususnya di Klaten kelindan dengan kepentingan-kepentingan perusahaan negara. Saling tarik antar kepentingan ini kentara apabila dilihat melalui pembacaan data yang padu dari luasan tanah konsesi, pencurian dan eksistensi Panitia Inti.

Fantastisnya luasan tanah konsesi milik PG Gondang Baru pada tahun 1961 disebabkan oleh belum adanya pengaturan dan pengalokasian konsentrasi tanah, yang mana merupakan tugas inti dari Panitia Inti. Hal berbanding terbalik dalam perspektif rakyat, yang mana sudah sejak 1959 rakyat (tani) telah menyampaikan keberatan terhadap rendahnya harga sewa dibandingkan ketika mereka mengurus sendiri tanahnya (*Suara Tani*, Th. X, No. 1, Januari 1959: 12). Puncak kekesalan terjadi pada akhir Juli 1961, saat PG Gondang Baru menorehkan catatan tertinggi luasan konsesi tanah dengan luas 1.626,8 ha, delegasi yang diketuai Padiosastro mewakili rakyat (tani) Klaten sebanyak 20.793 yang telah membubuhkan tanda tangan mereka menuntut kenaikan harga sewa kepada Menteri Agraria Sadjarwo di Jakarta (*Harian Rakjat*, 22 Juli 1961).

Setelah aksi memang harga sewa tanah tertinggi di tanah berpengairan bagus dengan durasi paling panjang 18 bulan yang semula Rp. 3.000 naik dua kali lipat menjadi Rp. 6.000 pada tahun tanam 1962. Akan tetapi, lonjakan dua kali lipat tersebut seakan tidak sebanding dengan rasio jika merujuk pada tahun tanam selanjutnya. Pada 1964 harga sewa dengan klasifikasi tanah yang sama mencapai kisaran Rp. 20.000 - Rp. 50.000. Umumnya rakyat (tani) menyewakan tanah

miliknya disebabkan oleh kondisi yang serba terbatas, jika tidak bisa dikatakan sebagai keterpaksaan. Selain ditentukan oleh relasi kuasa di perdesaan yang dipegang lurah dan aparat represif negara, pun lazimnya rakyat (tani) telah terjerat rentenir sebab sedikitnya uang dari harga sewa yang mereka terima di tahun sebelumnya (Hidajat 1995: 59).

Faktor politik juga menjadi faktor lain yang berpengaruh terhadap masifnya pencurian tanaman tebu di Klaten. Misalnya, di awal tahun 1964 usai digelar rapat umum Barisan Tani Indonesia (BTI) di Alun-alun Kota, ditambah kedatangan petinggi PKI pada 14 April di Klaten yang memberi penegasan mengenai prinsip “tanah bagi mereka yang benar-benar menggarapnya”, Njoto salah satu petinggi yang datang, juga menyerukan slogan “hancurkan tujuh setan desa” membuat membaranya politik agraria di daerah (Achdian 2008: 89-90). Tercatat sebanyak 30 kali aksi sepihak terjadi di Klaten, diantaranya terjadi di kelurahan Joton dan Jogonalan tempat di mana terdapat tanah konsesi milik PG Gondang Baru (*Centre for Village Studies* 1991: 123). Alhasil, pada tahun 1964 persentase pencurian tebu meningkat dua kali lipat menjadi 11,2% dari tahun sebelumnya yang hanya 5,53%.

Kulminasi saling silang kepentingan politik sebagai penanda suksesi kekuasaan (presiden) terepresentasi pada ontran-ontran yang terjadi di seantero negara, diikuti tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang berakibat pada tersingkirnya PKI dari konstelasi politik. Klaten sebagai salah satu lokus aktivitas PKI maupun organisasi-organisasi yang menjadi sejawat berbagai gerakan praktis mendapat imbasnya. Sebelum pembersihan oleh militer yang dimulai pada awal November 1965, aksi kekerasan dilakukan oleh PKI di Klaten sebagai respons atas peristiwa politik di Jakarta yang menasar kepada “para setan” anggota PNI di akhir Oktober 1965, sedikitnya peristiwa ini menelan 126 korban jiwa (*Centre for Village Studies*, 1991: 145; Hadi & Hera, 2020: 7). Telah diterangkan sebelumnya, berbagai aksi buruh maupun petani di PG Gondang Baru tidak terlepas dari keterlibatan gerakan kiri, khususnya yang memiliki relasi dengan PKI seperti SBG dan BTI. Bahkan, keaktifan SBG sebelum suksesi dapat dilihat dari keberadaan letak kantor sekretariatnya yang hanya terpisah oleh jalan di

samping timur PG Gondang Baru, sekarang kawasan Polsek Jogonalan (Wongso Sumarto, *Klaten 20 Juni 2022*).

Penyingkiran berbagai elemen, khususnya yang dianggap beririsan dengan aktivitas PKI, tidak hanya terjadi di luar pagar perusahaan melainkan hal serupa terjadi di dalam struktur PG Gondang Baru. Mulai dari dibentuknya tim *screening* melalui S.K. Pangkopkamtib No. Kep. 028/Kopkam/10/1968 yang bertugas untuk menangkap pegawai/buruh agar “mempertanggungjawabkan keterlibatannya dengan G30S-PKI” (*Laporan Tahunan 1969*, 28). Selanjutnya, berdasar surat Pangdak IX/Djawa Tengah No. Pol.A-471/Hp-494/ks-246/68 tertanggal 3 Juni 1968, terjadi pembersihan (penyingkiran) anggota korps keamanan perusahaan dengan dalih dicurigai terlibat G30S-PKI. Sayangnya, dalam laporan hanya menampilkan jumlah keanggotaan korps keamanan yang tersisa sebanyak 31 dan tidak menyebut jumlah anggota yang disingkirkan (*Laporan Tahunan 1969*, 29). Pun, organisasi buruh PG Gondang Baru yang semula didominasi oleh SBG kini pada 1969 diisi oleh KBKI, PAGI, GASBIINDO (hasil transformasi SBII pada 1961), Ikatan Buruh Pantjasila, GBG (Gerakan Buruh Gula afiliasi Sarbumusi), KBG (organisasi buruh marhaen).

Secara terang hingga artikel dimuat, tidak ditemukan data sebagai bukti adanya kerjasama antara PG Gondang Baru dengan kesatuan militer atau instansi negara lainnya di daerah yang berhubungan langsung terhadap aksi penyingkiran PKI dan berbagai organisasi lain sebagai sejawat. Akan tetapi, berdasar data pemberian “bantuan kepada pihak ketiga” sekalipun sudah dilarang sebelumnya melalui Instruksi Menteri Pertanian No. 29/Instr/Um/1968 tertanggal 16 Agustus 1968 berbagai instansi daerah seperti, militer, polisi, sipil, daerah/desa, dll. masih tetap menerima bantuan berupa dana dari PG Gondang Baru. Lebih-lebih, diketahui pemberian dana bantuan dari PG Gondang Baru kepada instansi resmi mengalami peningkatan, yang semula pada 1968 perusahaan mengeluarkan Rp. 747.203 selanjutnya pada 1969 menjadi Rp. 940.621 (*Laporan Tahunan 1969*, 27). Kecuali PG Kalibagor perusahaan-perusahaan lain di bawah Perusahaan Negara Perkebunan XVI seperti, PG Modjosragen, Tasikmadu, Tjolomadu, Tjepet Baru,

dan Gondang Baru khususnya tentang pemberian dana bantuan mengalami peningkatan.

Masuknya militer dalam kepengurusan perusahaan gula pasca nasionalisasi menandai realitas yang mendasari bagaimana fondasi Orde Baru telah dibangun. Tidak terkecuali divisi Diponegoro yang memainkan peran baru menceburkan diri dalam industri ini (Roger Knight, 2012: 416). Bukan merupakan sebuah kebetulan belaka jika sejak 1961 ditempatkan seorang militer berpangkat kolonel sebagai pengawas (produksi) pada struktur tertinggi kepengurusan perusahaan negara hasil nasionalisasi, bernama Badan Pimpinan Umum-Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN). Hal yang tidak ditemui dalam BPU-BPU lain seperti kehutanan, pertanian, perikanan dan peternakan.

## **KESIMPULAN**

Bersandar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa militerisasi terjadi dalam kepengurusan PG Gondang Baru yang merupakan salah satu perusahaan negara di bidang perkebunan hasil nasionalisasi 1957. Keterlibatan militer dalam perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi dilatari oleh situasi politik-ekonomi yang centang perenang sepanjang 1950-an. Namun, tidak seperti lazimnya perusahaan hasil nasionalisasi lain di mana keterlibatan secara dominan militer berakibat pada penurunan kinerja dan produksi perusahaan (K anumoyoso 2001: 87). Di PG Gondang Baru, pelibatan secara proporsional militer di bidang pengamanan produksi berkorelasi dengan eskalasi angka rasio produktivitas sebagai realitas eksklusif. Pelibatan militer baik secara individu maupun institusi sebagai penopang utama produksi termanifestasi melalui berbagai struktur organisasi yang dibuat secara berkala, seperti Staf Komando Keamanan Tebu pada 1959 dan Panitia Inti Perumus/Pengusul Sewa Tanah dan Rayoneering pada 1963.

Akan tetapi capaian produktivitas PG Gondang Baru yang senantiasa mengalami kenaikan saban tahun usai dinasionalisasi tersebut perlu dipahami tidak hanya dalam satu perspektif saja. Misalnya, rakyat (petani) lebih sering berada dalam posisi dikotomis dengan pihak perusahaan yang secara berkala semakin nyaman kedudukannya berkat dari peningkatan produktivitas. Hal ini menjadi

penanda bahwa konstelasi produksi gula di PG Gondang Baru tidak berjalan secara linear tanpa ketegangan, melainkan berjalan secara fluktuatif dan penuh ketegangan, seperti munculnya berbagai aksi protes rakyat (petani) menyoal tentang rendahnya harga sewa tanah yang diajukan pabrik setiap tahun. Selain itu, dalam artikel ini juga ditemukan bukti bahwa konstelasi politik berpengaruh pada arus produksi di PG Gondang Baru. Manuver PKI sebagai organisasi yang mengawal sekaligus mengejawantahkan UUPA 1960 secara linear berpengaruh pada besaran persentase tanaman tebu milik perusahaan yang hilang karena dicuri maupun rusak.

Jadi, dalam lini masa dekade pertama sejak PG Gondang Baru sebagai perusahaan negara pada 1957, terdapat hubungan interelasi antara militer dengan perusahaan untuk menjaga agar ketegangan tetap dalam batas toleran. Penyingkiran unsur gerakan kiri di selingkung PG Gondang Baru usai terjadi peristiwa politik luar biasa G30S pada 1965 menampilkan militer sebagai pemenang, jika bukan pahlawan. Korelasinya terjadi kenaikan signifikan angka produktivitas pada musim tanam 1966 hingga 1967 yang ditunjukkan dari besaran luas tanah sewa, hasil produksi gula dan kecilnya angka persentase pencurian tebu. Hal ini berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan rembesan dari keuntungan PG Gondang Baru kepada institusi militer daerah, sekaligus menjadi penanda bahwa relasi antara militer dengan perusahaan semakin erat pada tahun-tahun selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achdian, Andi. 2009. *Tanah Bagi yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Bogor: Kekal Press.
- Adriana, Alexandra Aisyah. 2017. "Perkembangan Industri Gula di Klaten, Jawa Tengah: Studi Kasus PT Pabrik Gula Gondang Baru 1957-1969". Skripsi. Universitas Indonesia.
- Centre for Village Studies. 1991. "Rural Violence in Klaten and Banyuwangi". In *The Indonesian Killings 1965-1966*. Robert Cribb (ed.). Clayton, Victoria: Monash University.
- Crouch. Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Danopoulos, Constantine P., Cynthia Watson (ed.). 1996. *The Political Role of The Military*. Westport; London: Greenwood Press.
- Fakih, Farabi. 2020. *Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965)*. Leiden; Boston: Brill.
- Feith, Herbert. 2007. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Jakarta: Equinox Publisher.
- Hadi Kuncoro, F. X. Domini B. B. Hera. 2020. "Peristiwa Kentong Gobyok: Di Antara Mengingat Sekaligus Melupakan Kekerasan 1965 di Klaten, Jawa Tengah". *Bandar Maulana Jurnal Ilmu Sejarah dan Budaya* 25 (1).
- Harian Rakjat*, 12 Juni 1957.
- Harian Rakjat*, 22 Juli 1961.
- Harian Rakjat*, 29 November 1958.
- Harian Rakjat*, 2 Oktober 1959.
- Hidajat, Deny Wahyu. 1995. "Pabrik Gula Gondangwinangoen di Klaten 1945-1960". Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Hidy, Ralph W. 2016. "Sejarah Perusahaan". In *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arah dan Perspektif*. Taufik Abdullah & Abdurrachman Surjomiharjo (ed.). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Inventaris Arsip Sekretariat Negara RI*, No. 1809.
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Knight, Roger. 2012. "From Merdeka to Massacre: The Politics of Sugar in The Early Years of The Indonesian Republic". *Journal Southeast Asian Studies*, 43, 3.
- Landsdrukkerij*. 1895. *Aantooning van de Hoeveelheden Door Eigenaars van Landbouw-Ondernemingen in Nederlandsh-Indie in 1894*. Batavia.
- Laporan Tahunan 1958
- Laporan Tahunan 1969
- Lindblad, Thomas. 2008. *Bridge to New Business*. Leiden: KITLV Press.
- Padmo, Soegijanto. 1995. "Ekonomi Perkebunan dan Keresahan di Pedesaan: Sebuah Survai Awal". *Humaniora*, 2.

- Padmo, Soegijanto. 2000. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Pradana, Yosef Denta Eka. 2018. "Pengaruh Nasionalisasi Terhadap Perkembangan PG Gondang Winangun Tahun 1957-1964". *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 3 (7).
- Purwanto, Bambang. 2009. "Economic Decolonization and The Rise of Indonesian Military Business". In *Indonesian Economic Decolonization in Regional and International Perspective*. J. Thomas Lindblad & Peter Post (ed.). Leiden: KITLV Press.
- Reeve, David. 2013. *Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika*. Depok: Komunitas Bambu.
- Simpson, Bradley. 2008. *Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S. Indonesian Relation*. Stanford; California: Stanford University Press.
- Suara Tani*, Th. X, No. 1, Januari 1959
- Suhartono. 1990. "Agroindustri dan Subsistensi Multikultur, Pajak dan Kerja Wajib di Vorstenlanden (1850-1990)". In *Seminar Sejarah Nasional V: Subtema Sejarah Industrialisasi*. Anhar Gonggong (ed.). Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967*. Jakarta: LP3ES.
- Suyitno, Heru. 1996. "Pabrik Gula Gondangwinangoen Sebelum dan Sesudah Nasionalisasi Tahun 1950-1963". Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Tedjakusuma, Iskandar. 2008. *Watak Politik Gerakan Serikat Buruh di Indonesia*. Jakarta: TURC.
- Wasino. 2016. "Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari". *Paramita*, 26 (1).
- Wawancara. Wongso Sumarto. Klaten. 20 Juni 2022.